



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HADI PRAWOTO
NIK : 3601341906630001
Lembaga : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Unit Kerja : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
Sub Unit Kerja : DIREKTORAT PELANGGARAN HAM BERAT
Jabatan : KEPALA SEKSI I SUBDIREKTORAT PENUNTUTAN
PELANGGARAN HAM BERAT
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 20 Februari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **HADI PRAWOTO**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: HADI PRAWOTO
Jabatan	: KEPALA SEKSI I SUBDIREKTORAT PENUNTUTAN PELANGGARAN HAM : BERAT - DIREKTORAT PELANGGARAN HAM BERAT - JAKSA AGUNG MUDA : BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2024

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



IKHTISAR LHKPN a.n HADI PRAWOTO
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2024)
NIK 3601341906630001

1. DATA PRIBADI

Nama	:	HADI PRAWOTO
NIK	:	3601341906630001
No KK	:	3601340506120002
NPWP	:	68.335.771.9-726.000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	JAKARTA/19 Juni 1967
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	KP. MAJA TAJUR NO. 14 RT 01 RW 01, MAJA SARI, PANDEGLANG, BANTEN
Nomor Handphone	:	081383647777
Email	:	hadiprawoto10@yahoo.co.id
NHK	:	96281
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Jabatan	:	KEPALA SEKSI I SUBDIREKTORAT PENUNTUTAN PELANGGARAN HAM BERAT - DIREKTORAT PELANGGARAN HAM BERAT - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
Tanggal Lapor	:	31 Desember 2024
Tanggal Kirim	:	20 Februari 2025
Status	:	Diumumkan Lengkap



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	NENENG SUHETI	ISTRI	PANDEGLANG , 19 Februari 1969 / PEREMPUAN	IBU RUMAH TANGGA	KP. MAJA TAJUR NO. 14, Kelurahan SUKARATU, Kecamatan MAJA SARI, Kabupaten/Kota PANDEGLANG, Provinsi BANTEN
2	NIDA AULIA H.	ANAK TANGGUNGAN	PANDEGLANG , 1 Juli 2002 / PEREMPUAN	MAHASISWA	KP. MAJA TAJUR NO. 14, Kelurahan SUKARATU, Kecamatan MAJA SARI, Kabupaten/Kota PANDEGLANG, Provinsi BANTEN
3	SYIFA RAHMA N.	ANAK TANGGUNGAN	SERANG , 10 September 1995 / PEREMPUAN	PNS BKKBN PROVINSI BANTEN	Perum Syariah Palima grand City Blok B1 No 9 Serang
4	M. IRVAN ZIDNY	ANAK TANGGUNGAN	PANDEGLANG , 26 Maret 1993 / LAKI-LAKI	PEGAWAI BPN KABUPATEN TANGGERANG	Kompleks Perumahan Persada Kota Serang Blok HH No. 14

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA SEKSI I SUBDIREKTORAT PENUNTUTAN PELANGGARAN HAM BERAT	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	DIREKTORAT PELANGGARAN HAM BERAT
2	KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
----	--------	------	-------------	----------------------------	--------------------------	------------



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : KP. MAJA TAJUR RT. 001 RW. 001 Kode Pos. Kel. / Desa : SUKA RATU Kecamatan : MAJA SARI Kab. / Kota : PANDEGLANG Prov. / Negara : BANTEN / INDONESIA	Tanah: 548 m ² Bangunan: 200 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 1337 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 1995	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.300.000.000	UBAH
2	Jalan / No : KP. KABAYAN RT. 001 RW. 001 Kode Pos. Kel. / Desa : KABAYAN Kecamatan : PANDEGLANG Kab. / Kota : PANDEGLANG Prov. / Negara : BANTEN / INDONESIA	Tanah: 1.444 m ² Bangunan: - m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 02063 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: PERTANIAN / PERKEBUNAN / PERIKANAN / PERTAMBANGAN Tahun Perolehan: 1994	Rp. 220.000.000	Rp. 225.000.000	UBAH
Sub Total					Rp. 1.525.000.000	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL Merk : HONDA HRV Model : SEDAN Tahun Pembuatan : 2019 No. Pol. / Registrasi : A 1789 JN	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (NIDA AULIA H.) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: -	Rp. 0	Rp. 248.000.000	BARU



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Tahun Perolehan: 2024			
2	Jenis : MOBIL Merk : HONDA JAZZ Model : MINIBUS Tahun Pembuatan : 2011 No. Pol. / Registrasi : B 268 JPU	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2011	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	TETAP
Sub Total				Rp. 368.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 10 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : AC, TV, Kulkas,Dispenser,Mesin Cuci Tahun Perolehan: 2019	HASIL SENDIRI	Rp. 80.000.000	Rp. 70.000.000	UBAH
2	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 10 Satuan : SET Ket. Lainnya : Sofa, meja dan kursi makan, tempat tidur, kursi tamu, kitchen set Tahun Perolehan: 2019	HASIL SENDIRI	Rp. 100.000.000	Rp. 95.000.000	UBAH



NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 165.000.000	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK BNI 46	Nomor : 0649804845 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 20.921.550	UBAH
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK BRI	Nomor : 008401052605501 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 29.565.550	UBAH
Sub Total				Rp. 50.487.100	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	



4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	PT. BRI (PERSERO)	SK PNS	Rp. 500.000.000	Rp. 165.302.400
Sub Total				Rp. 500.000.000	Rp. 165.302.400

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 719.468.200	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 60.000.000	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 779.468.200	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0



6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 220.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 10.000.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 10.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 14.000.000
Sub Total		Rp. 254.000.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

**6.3. PENGELUARAN LAINNYA**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 82.651.200
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 82.651.200

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 2.108.487.100	Rp. 165.302.400	Rp. 1.943.184.700

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.